

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Sejalan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas aparatur penyelenggaraan negara maka aparatur pemerintah desa perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuannya sehingga menjadi aparat yang mampu, terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam konsep ini aparatur pemerintah pada masing – masing tingkatan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan, pengayoman, mengarahkan partisipasi masyarakat, menghargai, dan memprakarsai masyarakat dalam membangun sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif serta untuk dapat lebih mendorong kehidupan dan tanggung jawab kepada masyarakat serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berkaitan hal tersebut aparatur pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam melaksanakan tugas – tugas yang langsung dengan masyarakat. Berdasarkan Intruksi Presiden no I tahun 1995 tentang perbaikan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat serta peraturan pemerintah RI No. 53 tahun 2010 tentang peningkatan disiplin pegawai negeri sipil. Oleh karena itu sebagai aparat terdepan dituntut untuk meningkatkan kualitas aparatur yang dimiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan kewajiban dengan sasaran tertatanya manajemen aparatur penyelenggaraan Negara

dalam menyelenggarakan tugasnya dengan meningkatkan kualitas kemampuan dan pelayanan masyarakat secara maksimal. Untuk meningkatkan kemampuan sebagai aparat yang mampu merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan dengan dilandasi semangat pengabdian sebagai abdi Negara, Bangsa dan Masyarakat. Dengan demikian apa yang diinginkan dalam mewujudkan *good governance* akan tercapai. Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif dimana pemerintah diharapkan selain berperan sebagai regulator juga sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat berperan aktif sebagai pelaku ekonomi dan sosial, Sektor Swasta menciptakan lapangan kerja, sementara Masyarakat berperan sebagai interaksi ekonomi, sosial dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat yang lain untuk ikut bersama berpartisipasi dalam berbagai aktifitas ekonomi sosial dan budaya.

Paradigma ***Good Governance*** menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat. hubungan antara domain harus dalam posisi sederajat dan saling kontrol, untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

Dalam penyelenggaraan tata Pemerintahan yang baik Pemerintah tidak lagi dominan. Pihak swasta dan Masyarakat juga berperan dalam proses pemerintahan. Bahkan memungkinkan sektor swasta akan lebih berperan dalam mendorong perubahan masyarakat dibandingkan sektor pemerintahan. Sehingga pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat dan sektor swasta untuk menilai bagaimana sebenarnya etika pemerintahan diwujudkan.

Penerapan dalam system pertanggungjawaban jelas dan tepat sangat diperlukan secara nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara bersih dan berdaya guna ,bersih dan tanggungjawab serta bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme

Sistem pengukuran kinerja dalam membantu pimpinan dalam memantau implementasi strategis dengan cara membandingkan antar hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja dapat dilihat pada pelayanan prima kepada yang membutuhkan ketepatan waktu, disiplin pegawai, kehadiran pegawai, pendidikan pegawai, kemampuan dan pengawasan akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak dari pemerintah kecamatan ,dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah Kantor Desa Begakecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso yang diharapkan dapat merealisasikan visi dan misi Kabupaten Poso dituntut untuk

meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam mewujudkan pemerintah yang baik serta mampu bekerja lebih profesional.

Namun dalam kenyataannya kinerja aparatur Desa di Kantor Desa BegaKecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini terlihat dengan pelayanan yang belum tepat waktu, masih kurangnya fasilitas yang dapat untuk menunjang proses administrasi, banyaknya aparatur yang tidak mampu menggunakan komputer dan disiplin kerja aparatur yang masih kurang.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengadakan penelitian dengan memilih judul “ Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Desa BegaKecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dalam hal ini yang menjadi masalah adalah :

- a. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso ?
- b. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.
- b. Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah khususnya bagi pemerintah Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- b. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini sebagai pengembangan ilmu administrasi Negara yang akan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian yang mempunyai substansi dan ruang lingkup yang sama.